

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A.1 Konsep Konflik

Menurut Ahmad Fedyani Syaifuddin dalam buku Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika karangan A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said (2007:183) menyatakan bahwa, konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan Daniel Webster dalam Peg Pickering (2001:1) mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya: pertentangan pendapat, kepentingan, atau pertentangan antar individu), perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan.

Pengertian konflik dari aspek antropologi, yaitu ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas social pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama.

Berdasarkan dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu konflik terjadi bila dalam suatu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan. Konflik tidak harus selalu berarti berseteru, meski situasi ini dapat menjadi bagian dari suatu konflik itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, bahwa konflik merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang merupakan suatu gejala perselisihan yang terjadi konflik antara dua pihak atau lebih, ketika keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama. Pertentangan atau konflik akan berkisar pada penyesuaian diri atau penolakan dari faktor-faktor sosial dari suatu kebutuhan tersebut. Adapun faktor-faktor sosial yang menuju integrasi tersebut ialah tujuan dari kelompok, sistem sosialnya, dan tindakan sosialnya.

Pada sisi lain dalam pemikiran teori konflik, Lewis Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran positif, atau fungsi positif dalam masyarakat. Coser memberikan perhatian terhadap asal muasal konflik sosial, bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara rasa cinta dan benci hadir, sehingga masyarakat akan selalu mengalami situasi konflik. Lewis Coser bertitik berat pada konsekuensi-konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem sosial secara keseluruhan. Dia menganggap bahwa keliru apabila memandang konflik sebagai hal yang melulu merusak sistem sosial, karena konflik juga dapat memberikan keuntungan pada masyarakat luas dimana konflik tersebut terjadi. Konflik justru dapat membuka peluang integrasi antar kelompok.

Dapat disimpulkan bahwa konflik berdasar pada asumsi bahwa individu atau kelompok masyarakat berfungsi sebisa mungkin berjuang untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh atau tujuan yang ingin mereka capai. Dalam konflik yang terjadi di Ambon adalah jenis konflik sosial. Pengertian dari konflik sosial itu sendiri adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Konflik sosial dapat terjadi karena berbagai prasangka dan sebab. Seperti, prasangka-prasangka ras, suku, agama, keyakinan politik atau ideologi, dan lain sebagainya. Adanya ketidakadilan akses pada sumber daya ekonomi dan politik memperparah berbagai prasangka yang sudah ada di antara kelompok-kelompok sosial.

Ada empat hal penting dalam memahami konflik sosial, yaitu:

1. Kompetisi (atas kelangkaan sumber daya seperti makanan, kesenangan, dan sebagainya).
2. Ketaksamaan struktural. Misalnya ketidaksamaan dalam hal kekuasaan, perolehan dalam struktur social.
3. Individu dan kelompok yang ingin mendapat keuntungan dan berjuang untuk mencapai revolusi.
4. Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara keinginan(*interes*) yang saling berkompetisi dan bukan sekedar adaptasi.

Konflik yang terjadi di Ambon juga diidentikan berhubungan erat dengan konflik ideologis karena agama dianggap sebagai factor yang memunculkan konflik yang terjadi. Menurut Dr. Nasikun dalam bukunya yang berjudul *Sistem*

Sosial Indonesia, pada tingkat ideologis, konflik-konflik dapat dilihat dalam bentuk-bentuk perbedaan-perbedaan pengertian dasar di antara berbagai golongan masyarakat mengenai berbagai macam hal. Konflik ideologis lebih mudah dilihat dalam hubungannya dengan perbedaan-perbedaan agama. Akan tetapi meski dimensi agama sangat menonjol, sesungguhnya konflik Ambon Maluku merupakan konflik yang sangat kompleks, dimana berbagai faktor sangat saling berpengaruh dan ikut andil baik faktor ekonomi, politik serta sosial budaya. Menurut Syamsul Hadi dkk dalam bukunya yang berjudul *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, seperti konflik Maluku mungkin dianggap sebagai konflik horizontal semata antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Namun, jika dilacak lebih jauh dan lebih mendalam maka akan tampak bahwa terdapat relasi yang tidak harmonis antara negara dan masyarakat secara vertikal.

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa konflik yang terjadi di Ambon merupakan konflik yang sangat kompleks. Meskipun sering diidentikkan dengan konflik agama namun sebenarnya konflik tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik dan sosial budaya sehingga konflik Ambon merupakan konflik horizontal yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Namun jika dilacak lebih jauh dan mendalam maka akan tampak konflik tersebut juga merupakan konflik vertikal yakni antara masyarakat dengan negara.

Menurut Syamsul Hadi dkk, konflik tanggal 19 Januari 1999, dapat disebut sebagai titik awal (*starting point*) bagi eskalasi konflik di Ambon, juga di Maluku. Kejadian yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri itu, sebenarnya

simpang siur dan memiliki banyak versi. (Hadi dkk, 2007:152). Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan berpendapat bahwa konflik di Ambon dan wilayah lain di Kepulauan Maluku yang pecah pada tanggal 19 Januari 1999 telah menyebabkan ribuan orang meninggal dan ribuan lainnya terluka atau menjadi pengungsi. (<http://buletinlitbang.dephan.go.id>)

Berdasarkan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 19 Januari 1999 telah terjadi suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di Ambon yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

A.2 Konsep Dampak Konflik

Konflik sosial di Ambon dan meluas ke seluruh Propinsi Maluku berawal dari perkelahian pemuda yang berbeda agama dan suku pada tanggal 19 Januari 1999. Konflik komunal yang berkepanjangan memberi dampak kerugian material dan immaterial yang tidak terhitung secara langsung dan menyeluruh kepada masyarakat Islam Maluku. (<http://tifadamaimaluku.blogspot.com>). Menurut Lambang Trijono, bahwa dampak konflik adalah akibat-akibat yang ditimbulkan konflik pada kehidupan sosial, seperti kekerasan, kerusakan, kesenjangan berlanjut, segregasi sosial, kemiskinan dan pengangguran baru, dan sebagainya (Trijono, 2007:147). Sedangkan soleman B. Taneko berpendapat bahwa dampak konflik dapat diartikan sebagai perubahan yang dapat dihasilkan dari suatu konflik, tetapi ada pula yang mengatakan sebagai benturan.(Taneko, 1993:63)

John Pieris berpendapat bahwa konflik sebagai suatu realitas sosial yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat, dengan demikian, mesti dibedah sebagai seluruh proses bermasyarakat dalam aras(level) nasional, regional dan global, baik sebagai komunitas sosial, budaya, ekonomi, agama maupun politik. Selanjutnya Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan menjelaskan bahwa bentrok antar masyarakat di Ambon dan di wilayah lain di Kepulauan Maluku yang pecah pada tanggal 19 Januari 1999 sebenarnya ada dan sudah berakhir. Namun dampaknya telah menyebabkan ribuan orang meninggal dan ribuan lainnya terluka atau menjadi pengungsi belum terhitung pula kerugian dalam bidang ekonomi, politik, agama dan sosial budaya.(<http://buletinlitbang.dephan.go.id>).

Dari pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa konflik sebagai suatu realitas sosial dapat membawa dampak yang mencakup segala bidang kehidupan masyarakat sebagai suatu keseluruhan baik dalam bidang agama, ekonomi, politik dan sosial budaya.

Dampak Konflik Dalam Bidang Agama

Syamsul Hadi dkk berpendapat bahwa konflik di Maluku sering diidentikkan dengan konflik antaragama, khususnya antara Islam dan Kristen. "Memang tidak dapat dinafikan bahwa konflik di Ambon dalam taraf tertentu memang mengeksploitasi isu-isu agama serta menjadikan tempat-tempat peribadatan sebagai salah satu sasaran amuk masa"(Syamsul Hadi dkk,2006:150). Masih menurut Syamsul Hadi dkk,

"dalam perkembangannya, konflik menjadi sangat nyata berdimensi agama. Hal ini jelas terlihat dari tindakan yang dilakukan, simbol-simbol

yang digunakan, serta slogan-slogan yang dipakai. Tindakan pembakaran gereja dan masjid, penggunaan salib atau kutipan Injil atau Al-Quran menjadi bagian yang tidak terlepas dari konflik”(Syamsul Hadi dkk,2006:177).

Selanjutnya menurut Lambang Trijono menjelaskan bahwa akibat dari konflik yang mengeras berdasar agama itu, komunitas masyarakat Ambon Maluku tidak bisa dihindari akhirnya terbelah menjadi dua berdasarkan identitas agama(Lambang Trijono,2001:84).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa konflik yang terjadi di Ambon telah membawa dampak juga dalam kehidupan Agama masyarakat dan hal tersebut dapat dilihat dari indikator yaitu hancurnya sarana ibadah. Selain itu juga adanya pola segregasi wilayah yang semakin terlihat jelas berdasar identitas agama.

Dampak Konflik Dalam Bidang Ekonomi

Lambang Trijono menjelaskan bahwa dampak lain yang parah akibat konflik Ambon adalah kelumpuhan kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang paling mengecam penduduk Ambon, terutama yang ada di pengungsian, adalah keterbatasan pasokan bahan makanan dan obat-obatan(Lambang Trijono,2001:78). Sedangkan Tri Ratnawati berpendapat bahwa akibat konflik Ambon/Maluku salah satunya adalah hilangnya aset-aset ekonomi(Tri Ratnawati, 2007:105).

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa terjadinya konflik Ambon 19 Januari 1999 telah membawa dampak dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya dapat dilihat dari indikato yang meliputi: lumpuhnya kegiatan

perekonomian, terhambatnya distribusi perekonomian dan hancurnya sarana-sarana perekonomian.

Dampak Konflik Dalam Bidang Politik

Semuel Waileruny menjelaskan bahwa:

”akibat negatif dalam bentuk kerugian yang timbul karena pertengkaran, permusuhan, pertentangan, perbedaan, rusuh, ancaman, kesusahan itu dapat digolongkan dalam bentuk fisik dan nonfisik. Kerugian fisik yaitu (1) kematian, (2) kehancuran berbagai sumber daya alam dan fasilitas. Kerugian Nonfisik yaitu (1) gangguan terhadap integrasi, (2) gangguan terhadap nilai-nilai yang bersifat positif, (3) timbulnya ketegangan dalam masyarakat, (4) gangguan proses pembangunan” (Semuel Waileruny, 2010:35).

Sedangkan Lambang Trijono berpendapat bahwa kerugian lain akibat konflik adalah terus merosotnya legitimasi hukum dan aparat pemerintahan yang semestinya diharapkan bisa mengatasi konflik ini (Lambang Trijono, 2001:80).

Dari penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa konflik juga telah membawa dampak bagi kehidupan politik dan hal ini dapat diketahui dari indikator yakni hancurnya fasilitas dan sarana pemerintahan dan adanya gangguan terhadap integrasi.

Dampak Konflik Dalam Bidang Sosial Budaya

Menurut Lambang Trijono, salah satu akibat terparah secara sosial-kultural dari konflik ini adalah semakin merosotnya wibawa adat, pranata sosial maupun tokoh-tokohnya (Lambang Trijono, 2001:77). Sedangkan Tri Ratnawati menjelaskan bahwa dalam periode konflik berdarah di Ambon yang dimulai pada tanggal 19 Januari 1999, masih ada beberapa kelompok warga (baik dari

kalangan Islam, Kristen, Katolik ataupun campuran) yang mengorganisasikan diri untuk tidak terlibat dalam "konflik benuasa agama" itu (Tri Ratnawati, 2007:6).

Dari pendapat tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa dalam bidang sosial budaya, dampak konflik Ambon 19 Januari 1999 tidak hanya bersifat negatif akan tetapi ada hal positif. Hal ini dapat diketahui melalui indikator yang meliputi: merosotnya wibawa adat, pranata sosial maupun tokoh-tokohnya dan juga bermunculannya organisasi sosial masyarakat dalam rangka membantu upaya perdamaian.

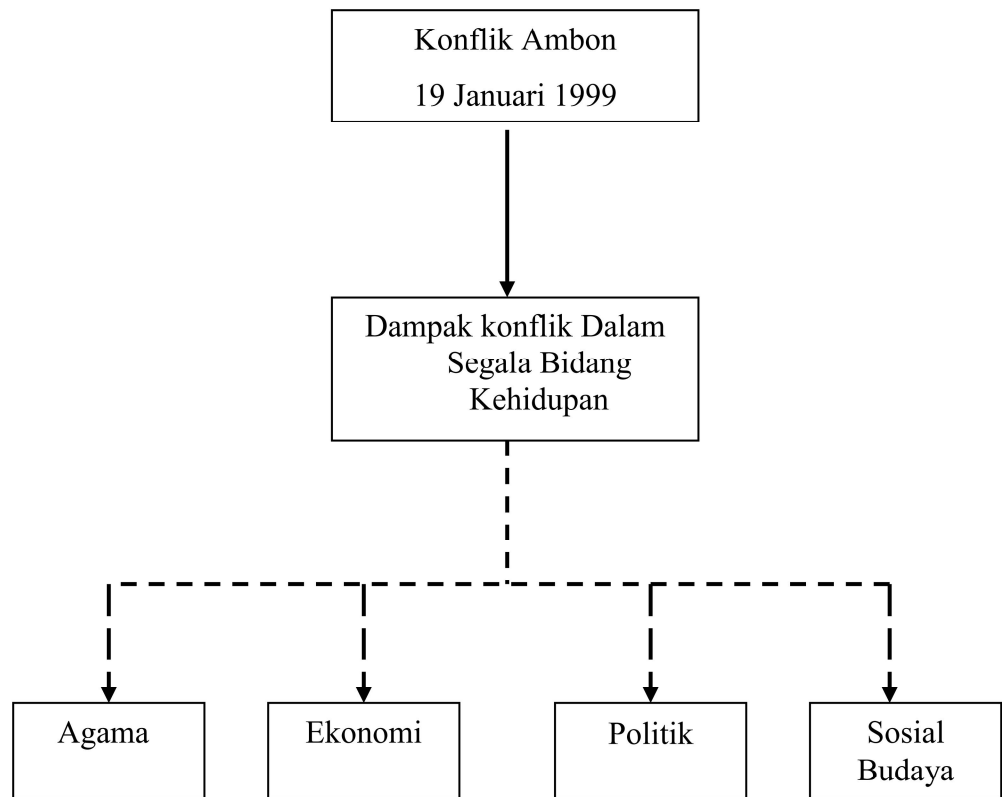
B. Kerangka Pikir

Masyarakat Ambon dikenal sebagai masyarakat majemuk yang dicirikan dengan heterogenitas etnik dan agama dari penduduk yang mendiaminya. Bahkan secara umum, kepulauan Maluku termasuk juga Ambon tidak hanya didiami oleh penduduk asli daerah tersebut, namun juga mencakup penduduk pendatang dari berbagai kawasan Indonesia, terutama Bugis, Buton, Makasar, dan sebagian minoritas suku Minahasa, Jawa dan Cina. Dari segi komposisi pemeluk agama, Islam dan Kristen Protestan merupakan dua agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk. Selain itu juga terdapat pemeluk agama Katolik, Hindu, serta Budha dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Secara umum, di masa lampau interaksi penduduk yang berasal dari berbagai identitas dan latar belakang tersebut berjalan secara terkontrol. Hal ini minimal ditunjukkan dengan tidak adanya peristiwa-peristiwa konflik secara besar yang disebabkan oleh gesekan etnik maupun agama di bumi rempah-rempah tersebut.

Akan tetapi, kondisi yang relatif stabil tersebut berubah drastis memasuki awal tahun 1999. Dipicu oleh perselisihan individu antarwarga mengenai perkelahan antar seorang warga yang berasal dari agama Kristen dengan seorang beragama Bugis, pada tanggal 19 Januari 1999 yang bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Fitri, Ambon berubah menjadi lading konflik berdarah yang paling memilukan. Konflik yang semula hanya berlangsung di satu kawasan kecil permukiman di Kota Ambon, dalam waktu singkat meluas keseluruh wilayah Ambon, dan bahkan dalam hitungan hari juga telah merambah pulau-pulau lain di Provinsi Maluku. Dinamika konflik yang kompleks mengakibatkan konflik berlarut-larut.

Sejak pertama kali berkobar pada tanggal 19 Januari 1999, konflik di Ambon baru dianggap relative terhenti empat tahun kemudian yaitu pada tanggal 15 September 2003, bersamaan dengan ditetapkannya Maluku sebagai daerah tertib sipil. Akibat paling nyata dari konflik Ambon adalah kerugian yang di alami masyarakat Ambon secara besar-besaran, baik kerugian dalam bidang Agama, Ekonomi. Politik dan Sosial budaya.

C. Paradigma



Keterangan:

—————> : Garis Sebab

- - - - -> : Garis Akibat

Referensi

- Gatara, A.A Said, Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. CV. Pustaka Setia. Bandung Halaman 183
- Pickering, Peg. 2001. *How To Manage Conflict Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga. Jakarta. Halaman 1.
- Nasikun. 1990. *Sistem Sosial Indonesia*. CV Rajawali. Jakarta. Halaman 152.
- Hadi, Syamsul. Widjajanto, Andi Dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Halaman 152.
- Ibid, Halaman 177.
- Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan/dimuat dalam <http://buletinbang.dephan.go.id>. Dikutip pada 19 April 2011.
- Institut Tifa Damai Maluku/Dimuat Dalam <http://tifadamaimaluku.blogspot.com>. Dikutip pada 19 April 2011
- Soekartawi. 1995. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Rajawali. Jakarta. Halaman 140.
- Taneko, Soleman B. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. 1984. Rajawali. Jakarta. Halaman 63.
- Trijono, Lambang. *Keluar Dari Kemelut Maluku*. 2001. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Halaman 84.

Ibid, Halaman 78.

Ibid, Halamn 80.

Ibid, Halaman 77.

Ratnawati, Tri.2007. *Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti*. Pustaka Pelajar. Jakarta. Halaman 105.

Ibid, Halaman 6.

Waileruny, Samuel. *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*. 2010. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Halaman 35.